

TINGKAT IMPLEMENTASI dan PERSEPSI TERHADAP SAK ETAP (STUDI PADA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT)

Nova Novita*

Puspita

STIE Indonesia Banking School, Jalan Kemang Raya no 35, Jakarta Selatan
Nova.novita@ibs.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 24, 2018

Revised May 10, 2018

Accepted June 2, 2018

Key words:

SAK ETAP, Small and Medium Enterprises, Palm Oil, Smallholder, Cooperation.

ABSTRACT

This study aims to see the level of SAK ETAP implementation in oil palm plantation cooperatives in West Sumatra and Jambi. The oil palm plantation cooperative was chosen, because the existence of this cooperative contributed greatly to the national palm oil exports, more than 20 million Indonesians rely on this sector, but very few studies have made palm oil cooperatives the object of research. The results show that the level of SAK ETAP implementation in oil palm plantation cooperatives is generally very good, in other words has implemented a large part of SAK ETAP. The results also show that all respondents agree about the implementation and benefits received by the cooperative with the application of SAK ETAP. The average difference test results indicate that there is no difference in the application of ETAP SAK to the manager and supervisor of oil palm plantation cooperatives in West Sumatra and Jambi. The result of difference test of average perception shows the difference of perception to SAK ETAP on the manager and supervisor of oil palm plantation cooperative in West Sumatra and Jambi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat implementasi SAK ETAP di koperasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dan Jambi. Koperasi perkebunan kelapa sawit dipilih, karena keberadaan koperasi ini berkontribusi besar terhadap ekspor kelapa sawit nasional, lebih dari 20 juta orang Indonesia bergantung pada sektor ini, tetapi sangat sedikit penelitian yang menjadikan koperasi kelapa sawit sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan SAK ETAP di koperasi perkebunan kelapa sawit umumnya sangat baik, dengan kata lain telah menerapkan sebagian besar SAK ETAP. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua responden setuju tentang implementasi dan manfaat yang diterima oleh koperasi dengan penerapan SAK ETAP. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penerapan ETAP SAK kepada manajer dan pengawas koperasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dan Jambi. Hasil uji beda persepsi rata-rata menunjukkan perbedaan persepsi terhadap SAK ETAP pada manajer dan pengawas koperasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat dan Jambi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia. Produksi minyak sawit mentah ini dilakukan oleh tiga pilar perkebunan kelapa sawit yakni perkebunan rakyat, perkebunan besar milik negara dan perkebunan besar milik swasta. Berdasarkan data Statistik Perkebunan Indonesia (2013) data luas total sementara perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 10.465.020 hektar dengan jumlah produksi total mencapai 27.782.004 ton. Bila dibagi berdasar pengusahaannya, perkebunan rakyat memiliki luas 4.356.087 hektar dengan jumlah produksi

10.010.728 ton. Perkebunan besar negara memiliki luas 727.767 hektar dengan jumlah produksi 2.144.651 ton. Perkebunan swasta memiliki luas 5.381.166 hektar dengan jumlah produksi sebesar 15.626.625 ton. Jika disajikan dalam persentase, luas perkebunan sawit yang diusahakan oleh rakyat memiliki persentase luas 41,6% dari luas total, sedangkan persentase produksi mencakup 36% dari total produksi nasional. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa perkebunan sawit rakyat memiliki potensi peranan yang signifikan dalam menjalankan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Data sebaran areal perkebunan sawit per provinsi menunjukkan bahwa areal perkebunan sawit terluas berada di pulau Sumatera (63,8%) dengan persentasi produksi 69,2% disusul Kalimantan (31,6%) dengan produksi 27,6%. Rincian mengenai luas areal dan produksi perkebunan Sumatera disajikan dalam Tabel 1. dibawah ini. Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa tiga besar rasio produksi per hektar dimiliki oleh Sumut (3,39), Riau (3.03) dan Sumbar (2,81). Sumatera Barat menunjukkan data yang menarik, meski dengan luas areal hanya 5% dari total luas sumatera namun mampu memiliki rasio produksi per hektar terbesar ke tiga untuk Sumatera.

Tabel 1. Data Luas Areal dan Produksi Sawit Sumatera Tahun 2013

Propinsi	Luas (Ha)	%Luas	Produksi (ton)	%Produksi (ton)	Rasio Produksi per Ha
Aceh	396,644	0.06	817,525	0.04	2.06
Sumut	1,340,348	0.20	4,549,202	0.24	3.39
Sumbar	364,208	0.05	1,022,332	0.05	2.81
Riau	2,193,721	0.33	6,646,997	0.35	3.03
Kep. Riau	19,036	0.00	36,774	0.00	1.93
Jambi	657,929	0.10	1,749,617	0.09	2.66
Sumsel	1,060,573	0.16	2,690,620	0.14	2.54
Kep. Bangka Belitung	201,091	0.03	508,125	0.03	2.53
Bengkulu	290,633	0.04	787,050	0.04	2.71
Lampung	158,045	0.02	424,054	0.02	2.68
Total	6,682,228		19,232,296		

Sumber: Data Diolah dari Statistik Perkebunan Indonesia (2013)

Proyek PIR-BUN OPHIR (Inti-Plasma) di kabupaten Pasaman Barat sejak dibangun awal 1980-an hingga tahun 2016 telah berumur 35 tahun. Proyek ini awalnya meliputi 8000 hektar lahan perkebunan, dimana 4.800 hektar dikelola oleh rakyat (Plasma) dan 3,200 hektar dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara VI (Inti). Perusahaan inti menjalankan fasilitas pengolahan buah sawit, sedangkan petani (Plasma) menjadi *supplier* bagi perusahaan inti. Para petani Plasma ini kemudian dibagi menjadi 5 plasma (plasma 1, 2, 3, 4, dan 5). Setiap plasma rata-rata terdiri dari 400 kepala keluarga, setiap kepala keluarga masing-masing memiliki 2 hektar kebun. Untuk memudahkan pengelolaan kebun, setiap plasma memiliki Koperasi Perkebunan Sawit (KPS). Sedangkan di Jambi, KUD Dano Bangko memiliki anggota 202

KK dengan luas arela rebun 413,44 hektar. KUD Akso Dano memiliki anggota 2000 KK, dengan luas kebun mencapai 6126 hektar. Kegiatan koperasi perkebunan sawit bervariasi, mulai dari pemesanan dan pendistribusian pupuk ke areal kebun, pengangkutan tandan buah segar ke pabrik, administrasi produksi, penjualan dan distribusi hasil penjualan kepada anggotanya hingga usaha simpan pinjam. Melalui koperasi ini, setiap anggota menerima laporan dan hasil penjualan buah setiap bulannya, layaknya karyawan yang menerima gaji setiap bulan. Beberapa plasma ini saat ini telah memulai periode peremajaan tanaman (*replanting*).

Undang-undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, mendefinisikan koperasi sebagai "badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dari kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip akuntansi". Untuk mengukur kesuksesan operasional usaha, koperasi harus menyampaikannya dalam sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi, baik dari internal (pengurus dan anggota) maupun eksternal (pemerintah dan Bank). Bila koperasi tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan standar pelaporannya, maka tingkat keyakinan akan laporan keuangan yang dibuat koperasi tersebut akan rendah. Akibatnya bila koperasi ingin menambah modal dari pihak eksternal akan terkendala persoalan akuntabilitas laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat menahan laju perkembangan usaha koperasi.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 telah meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi usaha kecil dan menengah dan koperasi. Saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Langkah ini merupakan upaya mewujudkan UMKM Indoensia yang maju, mandiri dan modern. Pemerintah bahkan mendorong penerapan SAK ETAP bagi koperasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi SAK ETAP mulai berlaku efektif per 1 Januari 2011. Penerapan SAK

ETAP di Usaha Kecil dan Menengah Indonesia telah dievaluasi oleh sejumlah peneliti seperti Dewi, Herawati dan Purnamawati (2016), Asma-harani, Atmadja dan Sinarwati (201), Warno (2014), Rudiantoro dan Siregar (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK ETAP, sejak diformalkan tahun 2011 hingga kini masih belum menyeluruh. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa permasalahan penelitian ini adalah tingkat implementasi SAK ETAP yang masih beragam pada laporan keuangan koperasi.

Riset mengenai implementasi SAK ETAP terutama pada koperasi perkebunan sawit, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagian besar riset terkait implementasi SAK ETAP, tidak mengkhususkan pada sektor UMKM tertentu. Berdasarkan data nasional luas kebun petani sawit swadaya mencapai 41,6% dengan produksi mencakup 36% dari produksi sawit nasional. Lebih dari 20 juta kepala keluarga menggantungkan hidupnya pada hasil sawit. Diperlukan dukungan teknis pengelolaan kebun, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi mereka. Salah satu bentuk dukungan dari bidang ilmu akuntansi adalah membantu penerapan menyeluruh dari SAK ETAP khususnya pada koperasi perkebunan sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan dan persepsi pengurus koperasi terhadap SAK ETAP di koperasi perkebunan sawit di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan Muaro serta Batang Hari Provinsi Jambi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bukti implementasi dari SAK ETAP, sehingga dapat menjadi masukan bagi penyusun standar. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Implementasi SAK ETAP yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip pengakuan dan pencatatan yang ada di SAK ETAP yang telah dirangkum oleh Narsa dan Isnalita (2014). Penelitian ini dilakukan pada 5 Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan 4 Koperasi Perkebunan Sawit (KPS) di Kabupaten Batang hari dan Muaro, Jambi.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial

statement) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

SAK ETAP terdiri dari 30 bab yang terdiri dari:

Tabel 2. SAK ETAP

Bab 1 Ruang Lingkup	Bab 16 Aset Tidak Berwujud
Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif	Bab 17 Sewa
Bab 3 Penyajian Laporan Keuangan	Bab 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontinjensi
Bab 4 Neraca	Bab 19 Ekuitas
Bab 5 Laporan Laba Rugi	Bab 20 Pendapatan
Bab 6 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	Bab 21 Biaya Pinjaman
Bab 7 Laporan Arus Kas	Bab 22 Penurunan Nilai Aset
Bab 8 Catatan atas Laporan Keuangan	Bab 23 Imbalan Kerja
Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan	Bab 24 Pajak Penghasilan
Bab 10 Investasi pada Efek Tertentu	Bab 25 Mata Uang Pelaporan
Bab 11 Persediaan	Bab 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing
Bab 12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak	Bab 27 Peristiwa setelah Akhir Periode Pelaporan
Bab 13 Investasi pada Joint Venture	Bab 28 Pengungkapan Pihak - pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Bab 14 Properti Investasi	Bab 29 Ketentuan Transisi
Bab 15 Aset Tetap	Bab 30 Tanggal Efektif

Dalam pembuatan laporan keuangan koperasi Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dibandingkan PSAK Umum. Sejumlah penelitian telah mencoba menginvestigasi tingkat penerapan SAK ETAP.

Dewi dkk., (2016) mengevaluasi tingkat implementasi SAK ETAP pada Koperasi di Kecamatan Buleleng, dan meninjau persepsi pelaku Koperasi di Kecamatan Buleleng terhadap implementasi SAK ETAP. Penelitian Dewi dkk., (2016) menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian Dewi dkk., (2016) menggunakan metode survei, menggunakan penyebaran kuesioner (angket) tertutup kepada responden yang menjadi sampel penelitian dan melakukan wawancara terhadap beberapa responden tersebut. Sebanyak 174 kuesioner telah disebarkan yakni 87 kuesioner tingkat implementasi dan 87 kuesioner persepsi untuk pelaku koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan

Buleleng memperoleh skor interval 'kurang diterapkan', dari masing-masing indikator diketahui bahwa sebagian besar koperasi cukup menerapkan SAK ETAP namun hanya pada prinsip-prinsip tertentu saja. Sedangkan mengenai persepsi pelaku koperasi terhadap SAK ETAP masuk pada kategori 'setuju' yang berarti pelaku koperasi memiliki persepsi yang baik terhadap penerapan SAK ETAP meskipun terdapat perbedaan persepsi dari hasil wawancara lebih lanjut.

Asmahrani, Susilawati dan Halim (2015) meneliti mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan dan beban pada Koperasi Tombo Ati Muamalah Jatim dengan SAK ETAP dan mengetahui hasil implikasi penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan tahun buku 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian pencatatan pendapatan dan beban pada Koperasi Tombo Ati Muamalah Jatim belum sesuai dengan SAK ETAP. Praktek yang ada menunjukkan bahwa pendapatan jasa yang diterima oleh Koperasi Tombo Ati Muamalah Jatim belum dipisahkan antara pendapatan dari anggota dan non anggota yang nantinya akan mempengaruhi hasil partisipasi bruto terhadap laba atau sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota.

Warno (2014) meneliti mengenai kepatuhan koperasi di Semarang terhadap SAK ETAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi di Kota Semarang (50 koperasi) hanya sebagian kecil yang sudah menerapkan SAK ETAP, sedangkan sebagian besar telah mencoba menerapkan SAK ETAP tetapi belum keseluruhan ketentuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP sama sekali.

Andriani, dkk., (2014) melakukan analisis terhadap pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Buleleng, yaitu Peggy Salon. Meskipun Peggy Salon telah lama didirikan, memiliki organisasi serta aktivitas bisnis yang memadai namun belum dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik dalam memberikan bonus kepada karyawannya, 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari

stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

Kumar (2014) meneliti mengenai kesiapan usaha kecil dan menengah di Uni Emirat Arab dalam mengadopsi IFRS for SMEs. Usaha Kecil dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian UEA. UAE baru-baru ini diklasifikasikan dalam pasar berkembang dengan jumlah UKM sekitar 85% - 95%. Dengan kondisi tersebut, bank dan investor menjadi sangat selektif dalam memberi pinjaman. Studi dilakukan untuk mengeksplorasi kesiapan UKM di UEA untuk mengadopsi IFRS bagi UKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% dari UKM di UEA cenderung untuk mengikuti IFRS untuk UKM di tiga tahun ke depan.

Narsa dan Isnalita (2014) meneliti tingkat penerapan, persepsi pengurus dan akuntansi pendidik terhadap SAK ETAP pada koperasi di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode survei. Data hasil survei diolah dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda. Dari 150 kuesioner yang didistribusikan, diperoleh hasil sebagai berikut: tingkat penerapan SAK ETAP pada koperasi sampel berada dalam kategori '*Less Implemented*', persepsi pengurus koperasi dan akuntan pendidik terhadap SAK ETAP tergolong kedalam "Agree". Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara pengurus koperasi dengan akuntan pendidik.

Rudiantoro dan Siregar (2012) menguji pengaruh dari kualitas laporan keuangan UMKM terhadap tingkat kredit yang diterima UMKM tersebut, serta prospek dari implementasi SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di tahun 2011 terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dengan responden pengusaha UMKM yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan beberapa wilayah lain di pulau Jawa. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya. Prospek implementasi SAK ETAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan sampai sejauh ini masih menghadapi kendala akibat masih rendahnya pemahaman para pengusaha UMKM atas SAK ETAP tersebut.

Tyas dan Fachriyah (2012) melakukan evaluasi penerapan standar akuntansi keuangan dalam pelaporan aset biologis. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus tunggal yang diadakan pada sebuah koperasi perkebunan "M" di kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Proses evaluasi dilakukan berdasarkan kesesuaian aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan khusus pada aset biologis yang dimiliki Koperasi "M". Data penelitian didapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber dari Koperasi "M" dan observasi ke lokasi penelitian untuk melihat kegiatan operasional terkait pengolahan aset biologis Koperasi "M". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan aset biologis yang dilakukan oleh Koperasi "M" belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Unsur yang sesuai dengan SAK ETAP adalah pengakuan akun Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) serta penggunaan metode biaya historis sebagai dasar pengukuran aset tersebut. Unsur yang tidak sesuai dengan SAK ETAP adalah tidak adanya pengakuan penyusutan aset biologis yang masuk ke dalam kelompok aset tetap, tidak adanya pengukuran dan pengakuan mengenai beban kerugian atas aset yang rusak atau produk yang cacat, dan tidak terdapat akun Persediaan di dalam Laporan Posisi Keuangannya. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa Koperasi "M" sebaiknya melakukan beberapa poin usulan pelaporan aset biologis seperti yang diajukan oleh peneliti agar penerapan SAK ETAP bisa dilaksanakan dengan baik dan mampu menambah kualitas laporan keuangan Koperasi "M".

Rudiantoro dan Siregar (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM terhadap SAK ETAP di Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 50 responden UMKM hanya 32% (16 responden) yang mengaku pernah mengetahui atau mendengar SAK ETAP. Hanya 11 responden yang pernah memperoleh pelatihan terkait SAK ETAP. Pada riset ini ditemukan bahwa jenjang pendidikan terakhir berpengaruh positif terhadap pemahaman SAK ETAP pelaku UMKM. Lama usaha berpengaruh negative terhadap pemahaman SAK ETAP. Sedangkan latar belakang pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman SAK ETAP.

Atik (2010) meneliti tentang bagaimana persepsi para pelaku ukm terhadap diadopsinya ifrs for smes di negara turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74,7% responden menyiapkan pelaporan keuangan berdasarkan aturan pajak dan hanya 1,81% menyiapkan berdasarkan ifrs. Hal

tersebut dikarenakan hanya sekitar 17,87% responden mengetahui tentang ifrs for smes. Namun demikian 94,41% responden mendukung adanya pengadopsian standar tersebut dan 88,19% responden memiliki keinginan untuk menerapkannya. Penelitian bunea, sacarin dan mihaela (2012) menunjukkan hasil bahwa 52,6% responden, dari total 190 akuntan romanian, setuju untuk diadakannya sistem pelaporan keuangan yang lebih disederhanakan lagi bagi ukm. Namun hanya 4,2% responden setuju bahwa ifrs for smes cocok digunakan bagi ukm. Terakhir, hasil penelitian milik otchere dan agbeibor (2012) menunjukkan bahwa bisnis kecil di ghana tidak terlalu memiliki kebutuhan atas ifrs for smes. Hal itu disebabkan karena mereka jarang atau tidak memiliki struktur dan aktivitas internasional sehingga tidak diminta untuk menyiapkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan secara internasional. Kemudian ditemukan pula bahwa beberapa karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, bentuk hukum, dan jumlah pemilik memiliki hubungan positif yang rendah terhadap kebutuhan bisnis kecil atas ifrs for smes.

METODE PENELITIAN

Riset ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui survei terhadap pengurus koperasi perkebunan sawit di provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, berdasarkan kesediaan pengurus koperasi sebagai responden. Survei dilakukan untuk melihat tingkat penerapan SAK ETAP dan persepsi pengurus koperasi terhadap SAK ETAP. Tingkat penerapan SAK ETAP pada penelitian ini didefinisikan sebagai ukuran besarnya intensitas kesesuaian tata cara dan sistematika pelaporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel persepsi pada penelitian ini adalah suatu sikap, pandangan, dan penilaian terhadap isu penerapan SAK ETAP. Indikator yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel ini adalah berdasarkan treatment prinsip pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian sesuai dengan definisi dan ketentuan yang ada dalam SAK ETAP. Sedangkan persepsi terhadap SAK ETAP dalam riset ini didefinisikan sebagai suatu sikap, pandangan, dan penilaian terhadap penerapan SAK ETAP.

Tingkat penerapan SAK ETAP diukur dengan menggunakan 5 skala, dari Sangat Tidak Diterapkan (STD), Tidak Diterapkan (TD), Kurang

Diterapkan (KD), Diterapkan (D) dan Sangat Diterapkan (SD). Persepsi pengurus koperasi terhadap SAK ETAP diukur dengan menggunakan 5 skala, dari Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Indikator tingkat penerapan dan persepsi terhadap SAK ETAP yang digunakan dalam riset ini, merujuk pada instrumen yang disusun oleh Narsa dan Isnalita (2014) (lampiran 1). Tingkat penerapan SAK ETAP diukur melalui 31 indikator, prinsip pengakuan diukur dengan menggunakan 4 indikator, prinsip pengukuran diukur dengan menggunakan 2 indikator, prinsip pengungkapan terdiri dari 4 indikator sedangkan prinsip penyajian terdiri dari 9 indikator. Sedangkan Persepsi terhadap SAK ETAP diukur dengan menggunakan 13 pernyataan.

Setelah hasil survei ditabulasi, selanjutnya dilakukan perhitungan rentang deskriptif skor persentase tingkat keterterapan dan persentase persepsi, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Khafid, 2010):

$$\% = \frac{\text{Skor Nyata (jawaban)} \times 100\%}{\text{Skor Ideal}}$$

Hasil perhitungan skor selanjutnya akan dikonversi kedalam tabel 3:

Tabel 3. Kriteria Keterterapan dan Kriteria Persepsi

Kriteria Keterterapan dan Kriteria Persepsi	Interval Rata-rata Skor
Sangat Tidak Diterapkan/Sangat Tidak Setuju	0% - 20%
Tidak Diterapkan/Tidak Setuju	>20% - 40%
Kurang Diterapkan/Kurang Setuju	>40% - 60%
Diterapkan/Setuju	>60% - 80%
Sangat Diterapkan/Sangat Setuju	>80% - 100%

Sumber: Narsa dan Isnalita (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dan koperasi perkebunan sawit yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Data Koperasi dan Jumlah Responden

Provinsi Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat		Provinsi Jambi Kabupaten	
1. Koperasi	5 orang	1. Koperasi Puding	5 orang

Perkebunan Sawit Maju (KPS Maju)	5 orang	Sejahtera	4 orang
2. Koperasi Perkebunan Sawit Makmur (KPS Makmur)		2. Koperasi Unit Desa Karya Mandiri	4 orang
3. Koperasi Perkebunan Sawit Perintis (KPS Perintis)	5 orang	3. Koperasi Unit Desa Harapan Jaya	6 orang
4. Koperasi Serba Usaha Niat Bersama	3 orang	4. Koperasi Unit Desa Akso Dano	
5. Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera			
Total Responden			37 orang

Tabel 5. Deskripsi Koperasi

No.	Koperasi	Jumlah Anggota	Luas Kebun
1.	Koperasi Perkebunan Sawit Maju (KPS Maju)	1.100 KK	2.200 Ha
2.	Koperasi Perkebunan Sawit Makmur (KPS Makmur)	115 KK	230 Ha
3.	Koperasi Perkebunan Sawit Perintis (KPS Perintis)	510 KK	1.020 Ha
4.	Koperasi Serba Usaha Niat Bersama		
5.	Koperasi Serba Usaha Bina Tani Sejahtera	486 KK	972 Ha
6.	Koperasi Puding Sejahtera	246 KK	1.000 Ha
7.	Koperasi Unit Desa Karya Mandiri	540 KK	1.080 Ha
8.	Koperasi Unit Desa Harapan Jaya		
9.	Koperasi Unit Desa Akso Dano	2.209 KK	4.418 Ha

Responden yang terlibat dalam survei ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam praktek pelaporan keuangan koperasi, terdiri dari pengurus, pengawas, kasir, manajer dan bagian keuangan. Survei di Jambi dilaksanakan mulai dari 14 Agustus hingga 17 Agustus 2017. Sedangkan di Sumatera Barat mulai dari 6-13 September 2017. Sebaran demografi responden disajikan pada tabel 6. dibawah ini:

Tabel 6. Demografi Responden

Usia	24-30 tahun	4 orang (11%)
	31-39 tahun	5 orang (14%)
	41-50 tahun	27 orang (70%)
	51-60 tahun	6 orang (16%)
	61-70	1 orang (3%)

Gender	Laki-laki: 31 orang (84%) Perempuan: 6 orang (16%)
Tingkat Pendidikan	Sarjana: 6 orang (16%) Diploma: 3 orang (8%) SMA/SMK: 29 orang (78%) SMP: 2 orang (5%) SD: 2 orang (5%)

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden atau pengelola koperasi dalam penelitian ini berusia senior yaitu 40-60 tahun dan mayoritas adalah laki-laki. Pengurus dan Pengawas pada koperasi sampel mayoritas berpendidikan SMA kecuali pada koperasi Perintis, seluruh pengurus koperasi berpendidikan strata satu. Responden yang berusia muda umumnya menempati posisi staf atau tidak duduk dalam struktur pengurus atau pengawas koperasi. Karena mayoritas tingkat pendidikan Pengurus dan Pengawas adalah tingkat SMA, maka rekrutmen staff menggunakan pertimbangan latar belakang keilmuan bidang akuntansi (SMK) atau sarjana untuk menunjang kerja Pengurus.

Tabel 7. Tingkat Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi Perkebunan Sawit

Tabel 7 menunjukkan tingkat penerapan SAK ETAP itu sendiri (terdiri dari 31 indikator) ditambah dengan pelaksanaan aspek pengakuan (terdiri dari 4 indikator), aspek pengukuran (2 in-

		STD	TD	KD	D	SD	Skor	Skor	In-ter-val	Kategori
		1	2	3	4	5	Nyata	Ideal		
Indikator Keterterapan	Frek	359	33	19	129	592	1132	5660	0.70	Diterapkan
	Total Skor	359	66	57	516	2960	3958			
Indikator Prinsip Pengakuan	Frek	0	2	2	21	123	148	740	0.95	Sangat Diterapkan
	Total Skor	0	2	4	84	615	705			
Indikator Prinsip Pengukuran	Frek	0	7	0	15	52	74	370	0.90	Sangat Diterapkan
	Total Skor	0	14	0	60	260	334			
Indikator Prinsip Pengungkapan	Frek	0	0	3	13	132	148	740	0.97	Sangat Diterapkan
	Total Skor	0	0	9	52	660	721			
Indikator Prinsip Penyajian	Frek	9	1	5	73	210	298	1490	0.92	Sangat Diterapkan
	Total Skor	9	2	15	292	1050	1368			

dikator), aspek pengungkapan (terdiri dari 4 indikator) dan aspek penyajian (terdiri dari 9 indikator). Dari tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat penerapan SAK ETAP di koperasi Perkebunan Sawit adalah 70% (kategori Diterapkan).

Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, koperasi telah berusaha membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar koperasi memiliki ketentuan yang tertuang dalam AD ART bahwa, laporan keuangan yang disampaikan dalam RAT adalah laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen. Berdasarkan hal tersebut, koperasi mendapat tekanan untuk membuat sistem akuntansi dan pelaporan yang sesuai standar. Akibatnya tingkat penerapan SAK ETAP pada koperasi perkebunan sawit ini secara umum tergolong memuaskan (70%). Namun demikian terdapat beberapa catatan yang ditemukan dalam penerapan SAK ETAP ini.

Catatan pertama terkait dengan aspek yang diterapkan dengan baik. Indikator yang diungkapkan dengan baik (diterapkan dan sangat diterapkan) terdiri dari: kas dan setara kas, Piutang usaha/Piutang dagang dan piutang lainnya, Persediaan (persediaan barang dagang), Aset Tetap, Kewajiban Imbalan Pascakerja, Modal (simpanan pokok, wajib dan sukarela), Pendapatan/Penjualan, Beban operasional, Beban non-operasional, Beban pajak, Laba bersih atau rugi bersih, Distribusi ke pemilik ekuitas, Penerimaan kas dari penjualan barang & jasa, Penerimaan kas dari aktivitas lain-lain, Pembayaran kas kepada pemasok barang & jasa, Pembayaran kas kepada anggota koperasi, Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap dan Penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak selain bank.

Catatan kedua, terkait aspek yang sangat tidak diterapkan meliputi: Investasi pada Properti, Aset tidak Berwujud, Utang Bank, Utang Usaha/Utang dagang dan Utang Lainnya, Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan yang diakui dalam periode, Pembayaran kas untuk memperoleh investasi pada properti, Penerimaan kas dari pinjaman bank, Pembayaran pinjaman bank dan Pembayaran pinjaman kepada pihak lain selain bank. Transaksi-transaksi tersebut tidak diterapkan karena mayoritas koperasi terikat pada kebijakan utang yang ketat, bahwa anggota koperasi tidak mengizinkan koperasi melakukan pinjaman pada bank maupun pihak lain. Sehingga rendahnya penerapan bukan disebabkan karena koperasi mengabaikan transaksi tersebut, namun karena memang transaksi tersebut tidak ada di sebagian besar koperasi. Mayoritas koperasi belum memiliki dana berlebih yang dapat di investasikan, hanya satu koperasi (Koperasi Perintis) yang ditemukan memiliki investasi pada ke-

bun.

Penerapan prinsip pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian menunjukkan kategori sangat diterapkan, seluruhnya berada di interval diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya koperasi sampel telah mencatat aset, kewajiban, penghasilan dan beban sesuai dengan prinsip pengakuan dalam SAK ETAP. Demikian juga halnya dengan aspek pengukuran transaksi dan pengungkapannya, rata-rata responden menjawab "sangat diterapkan". Penerapan prinsip penyajian juga sangat memuaskan, karena responden hanya memberikan jawaban "diterapkan dan "sangat diterapkan". Hasil ini mungkin dipengaruhi oleh adanya tuntutan dari mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang mewajibkan pengurus untuk memaparkan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun secara rutin.

Secara umum hasil penerapan SAK ETAP yang relatif memuaskan ini dipengaruhi oleh peran auditor independen. Selain mengaudit, berdasarkan penjelasan para responden, auditor tersebut juga menjelaskan dan mengarahkan bagaimana setiap elemen dalam laporan keuangan (aset, kewajiban, modal, pendapatan dan beban) dicatat dan dilaporkan.

Tabel 8. Persepsi Pengurus dan Pengelola Koperasi Perkebunan Sawit Terhadap SAK ETAP

		SIS	TS	KS	S	SS	Skor Nyata	Skor Ideal	Inter- ter- val	Kat ego- ri
		1	2	3	4	5				
Variabel Persepsi	Frek	38	53	20	15	195	458	2290	0,78	Set- uju
	Total Skor	38	106	60	61	975	1795			
Indikator I: Pengetahuan	Frek	16	15	8	51	50	140	700	0,75	Set- uju
	Total Skor	16	30	24	20	250	524			
Indikator II: Legalitas	Frek	8	13	5	37	42	103	525	0,78	Set- uju
	Total Skor	8	26	25	14	210	407			
Indikator III: Pendapatan	Frek	14	25	7	64	103	213	1065	0,80	Set- uju
	Total Skor	14	50	21	25	315	856			

Tabel 8 menunjukkan persepsi pengurus koperasi terhadap SAK ETAP. Indikator terkait persepsi di kelompokkan kedalam 3 indikator: Indikator I (menunjukkan pengetahuan), Indikator II (legalitas) dan Indikator III (menunjukkan pendapat responden terhadap SAK ETAP). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya responden mendukung penerapan SAK ETAP, hal ini terlihat dari interval indikator persepsi yang menunjukkan nilai 78% (setuju). Jika ditelisik lebih dalam, dari sisi pengetahuan terlihat bahwa responden dalam penelitian ini cukup mengetahui tentang SAK ETAP, meski tingkat interval terkait persepsi merupakan yang terendah (75%). Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pendidikan mayoritas pengurus yang berlatar belakang

SMA dan tidak berlatar belakang akuntansi. Untuk mengatasi kelemahan dari pengetahuan pelaporan keuangan tersebut, pengurus mengangkat staf administrasi/keuangan yang berlatar belakang akuntansi. Ditinjau dari sisi legalitas penerapan, responden juga setuju bahwa SAK ETAP merupakan pedoman pelaporan yang baku dan tepat bagi koperasi 78%. Terakhir, dari sisi pendapat, responden sepakat bahwa dengan adanya laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP akan memberi manfaat lebih pada koperasi, baik dalam hal penilaian capaian kinerja organisasi maupun kemudahan mengakses pinjaman dari bank.

Hasil uji beda rata-rata

Uji normalitas pada riset ini menggunakan Saphiro-Wilk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Persepsi tidak terdistribusi normal (sig. 0,000) sedangkan variabel Penerapan terdistribusi normal (sig. 0,083). Oleh karena itu, uji beda rata-rata antara persepsi Provinsi Jambi dan Sumatera Barat akan menggunakan Levene Test (statistik parametrik) sedangkan uji beda rata-rata antara penerapan SAK ETAP Provinsi Jambi dan Sumatera Barat akan menggunakan Mann Witney Test (statistik nonparametrik).

Tabel 9. Hasil Pengujian

Variabel	Hasil Pengujian
Persepsi	Terdapat perbedaan rata-rata (Mann Witney test)
Penerapan	Tidak terdapat perbedaan rata-rata (t-test)

Probability Levene's test $> 0,05$ (0.548), artinya tidak terdapat perbedaan varians pada Penerapan SAK ETAP di provinsi Sumbar dan Jambi, oleh karena itu uji beda rata-rata pada variabel ini mengasumsikan varian tidak homogen. Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penerapan SAK ETAP antara Provinsi Sumbar dan Jambi (sig, t-test 0, 061).

Hasil uji Mann Witney menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap SAK ETAP pada pengurus dan pengelola koperasi perkebunan di Jambi dan Sumbar (sig. Mann Witney U 0.003, kecil dari 0,05). Rata-rata persepsi pengelola koperasi di provinsi Sumbar lebih tinggi di banding koperasi di Jambi. Hasil ini mungkin dipengaruhi oleh tingkat kematangan dan pengalaman koperasi perkebunan Sawit OPHIR Sumbar yang lebih tinggi di banding Jambi, jumlah koperasi yang tergabung dalam skema OPHIR ada-

lah 3 dari 5 koperasi yang menjadi sampel dari Kab, Pasaman Barat. Koperasi OPHIR adalah koperasi yang pada awal didirikan menggunakan skema kemitraan Inti-Plasma. Pada skema ini perusahaan perkebunan milik pemerintah berperan sebagai pihak Inti. Skema NES PIR ini merupakan skema pertama yang digunakan oleh pemerintah pada tahun 1988 sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan koperasi lainnya menggunakan skema kemitraan Inti-Plasma generasi kedua dengan perusahaan swasta sebagai Mitra Inti. Dalam operasionalnya, koperasi yang berada dalam skema kemitraan generasi kedua, banyak diintervensi oleh perusahaan Inti, misalnya dalam hal pengelolaan kebun dan hasil panen. Hal ini sangat berbeda dengan koperasi skema kemitraan Inti-Plasma generasi pertama, yang saat ini independen dalam mengelola kebun, hasil panen maupun koperasi. Faktor lain yang menyebabkan mengapa persepsi terhadap SAK ETAP di provinsi Sumbar lebih tinggi dibanding Jambi, adalah kebijakan internal koperasi Pasaman Barat, yang seluruhnya mewajibkan audit independen atas laporan keuangan koperasi. Koperasi sawit di Jambi tidak mewajibkan audit independen atas laporan keuangan koperasi. Bagi koperasi yang bersentuhan dengan audit independen, dalam prosesnya akan mendapat transfer knowledge dalam hal pelaporan keuangan dari auditor yang mengaudit.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat penerapan SAK ETAP di koperasi perkebunan sawit di wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Koperasi perkebunan sawit dipilih, karena keberadaan koperasi ini berkontribusi besar bagi ekspor sawit nasional, lebih dari 20 juta rakyat Indonesia bergantung hidupnya pada sektor ini, namun demikian sangat sedikit penelitian yang menjadikan koperasi perkebunan sawit sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan SAK ETAP di koperasi perkebunan sawit secara umum sangat baik, dengan kata lain telah menerapkan sebahagian besar SAK ETAP. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh responden setuju mengenai penerapan dan manfaat yang diterima oleh koperasi dengan penerapan SAK ETAP. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Penerapan SAK ETAP pada pengelola dan pengawas koperasi perkebunan sawit di Sumbar dan Jambi. Hasil uji beda rata-rata Persepsi menunjukkan adanya perbedaan persepsi

terhadap SAK ETAP pada pengelola dan pengawas koperasi perkebunan sawit di Sumbar dan Jambi.

Penelitian ini tidak memisahkan penerapan SAK ETAP pada koperasi sawit pada skema kemitraan Inti-Plasma generasi pertama (Koperasi yang program Ophir: Koperasi Perintis, Maju dan Makmur) dan generasi kedua (Perusahaan mitra adalah perusahaan swasta). Terdapat perbedaan sistem kemitraan pada kedua jenis koperasi tersebut, yang tidak hanya berdampak pada sistem akuntansi dan pelaporan koperasi, tetapi juga pada mekanisme manajerial koperasi dan partisipasi anggota. Penelitian berikutnya disarankan membandingkan efektifitas dan efisiensi koperasi sawit sistem kemitraan Inti-Plasma generasi pertama dan kedua ini terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Karena tujuan didirikan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota.

Sedikitnya 2 dari koperasi sampel pada penelitian ini berada pada fase penanaman kembali (replanting), sehingga aktivitas koperasi tidak cenderung tidak banyak, hal ini tentu berdampak pada pencatatan transaksi harian koperasi dan laporan keuangan yang akan di hasilkan. Konsekuensinya, peneliti meminta responden pada koperasi tersebut mengisi angket dengan mengacu pada aktivitas normal. Kondisi ini menjadi temuan yang menarik, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji keberlanjutan koperasi yang memasuki fase replanting. Koperasi yang memasuki fase replanting, dapat dikatakan berada pada kondisi kritis, baik dari sisi kelembagaan koperasi maupun dari sisi keanggotaan koperasi. Bagi anggota yang menggantungkan pendapatan utama dari hasil penjualan buah sawit, pada saat memasuki periode penanaman kembali praktis akan kehilangan pemasukan utama selama 3 tahun (tanaman sawit muda membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk berbuah). Kondisi tersebut dapat mendorong anggota untuk menjual kebun mereka akibat himpitan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada kelembagaan koperasi. Tidak hanya itu, anggota koperasi juga membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk penanaman kembali sawit mereka. Perbedaan aturan main dan manajemen pada setiap kelompok petani yang bernaung di bawah koperasi menyebabkan tidak semua petani siap dengan pendanaan peremajaan kebun. Meski BPDPS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit) menyatakan akan membantu subsidi dana peremajaan kebun, hingga kini kebijakan tersebut belum jelas pelaksanaannya maupun pencairan dananya.

Koperasi perkebunan sawit yang diteliti hanya

terbatas pada Sumbar dan Jambi, penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel dari Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan. Sehingga penelitian ini belum dapat dikatakan mewakili seluruh koperasi perkebunan sawit di Indonesia. Kemudahan pelaksanaan survei penelitian dapat bekerjasama dengan APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) yang telah memiliki perwakilan hingga kabupaten dan BPDPS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit) demi mendorong kemajuan dan kesejahteraan petani sawit swadaya

REFERENCES

- Andriani, L., Atmadja, A. T., dan Sinarwati, N. K., (2014), Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Interpretatif Pada Peggy Salon), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 2 No 1.
- Asmahanani, N., Susilawati, R. A. E., dan Halim, A., (2015), Analisis SAK ETAP Tentang Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada Koperasi Tombo Ati Muamalah Malang Jawa Timur, *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol 3 No 1.
- Atik, A., (2010), SME's Views on the Adoption and Application of "IFRS for SMEs" in Turkey, *European Research Studies Journal*, Vol XIII No 4, page 19-32.
- Bunea, S., Sacarin, M., dan Mihaela, M. I. N. U., (2012), Romanian Professional Accountants' perception on The Differential Financial Reporting for Small and Medium-Sized Enterprises, *Accounting and Management Information Systems*, Vol 11 No 1.
- Dewi, K. N. T., Herawati, N. T., dan Purnamawati, I. G. A., (2016), Implementasi SAK ETAP dan Persepsi Pelaku pada Koperasi (Studi Empiris pada Koperasi di Kecamatan Buleleng), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 4 No 1.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- Khafid, M., (2010), Analisis PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan Usaha Pada KPRI, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol 2 No 1.
- Kumar, V., (2014). Readiness of SMEs in UAE for an accounting standard transition to IFRS for SMEs: an empirical analysis, *International Journal of Strategic Business Alliances 1*, Vol 3 No 4, page 282-296.
- Narsa, N. P. D. R. H. dan Isnalita, (2014), Keterapan SAK ETAP Pada Koperasi serta Persepsi Pelaku Koperasi dan Akuntan Pendidik, *Artikel* disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi, Universitas Mataram, Lombok.
- Otchere, F. A., dan Agbeibor, J., (2012), The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMES) Suitability for small businesses in Ghana, *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol 10 No 2, page 190-214.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi SAK ETAP
- Rudiantoro, R., dan Siregar, S. V., (2012), Kualitas Laporan Keuangan Umkm Serta Prospek Implementasi SAK ETAP, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 9 No 1.
- Statistik Perkebunan Indonesia (2013). www.bps.go.id
- Tyas, E. L. A. dan Fachriyah, N., (2012), Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam Pelaporan Aset Biologis (Studi Kasus Pada Koperasi "M"), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol 1 No 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Warno. (2014), Kepatuhan Koperasi di Kota Semarang Terhadap Standar Akuntansi Keuanganentitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Tahun 2013, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 5 No 1.

LAMPIRAN

Tabel 10. Instrumen Penilaian Tingkat Penerapan SAK ETAP

No.	Penerapan	Frekuensi Pencatatan pada Koperasi				
		STD	TD	KD	D	SD
1.	Kas dan setara kas					
2.	Piutang usaha/Piutang dagang dan piutang lainnya					
3.	Persediaan (persediaan barang dagang)					
4.	Investasi pada Properti					
5.	Aset Tetap (tanah/bangunan/peralatan/mesin)					
6.	Aset tidak Berwujud (goodwill,hak-paten)					
7.	Utang Bank					
8.	Utang Usaha/Utang dagang dan Utang Lainnya					
9.	Kewajiban Imbalan Pascakerja					
10.	Aset dan Kewajiban Pajak					
11.	Kewajiban Diestimasi (hutang garansi, perovisihan piutang ragu-ragu)					
12.	Ekuitas					
13.	Pendapatan/Penjualan					
14.	Beban operasional (beban penjualan;beban administrasi dan umum,dll)					
15.	Beban non-operasional (beban penyusutan)					
16.	Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas					
17.	Beban pajak					
18.	Laba bersih atau rugi bersih untuk periode					
19.	Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan yang diakui dalam periode					
20.	Distribusi ke pemilik ekuitas (SHU)					
21.	Penerimaan kas dari penjualan barang & jasa					
22.	Penerimaan kas dari aktivitas lain-lain					
23.	Pembayaran kas kepada pemasok barang & jasa					
24.	Pembayaran kas kepada anggota koperasi					
25.	Penerimaan kas dari penjualan aset tetap					
26.	Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap					
27.	Pembayaran kas untuk memperoleh investasi pada properti					
28.	Penerimaan kas dari pinjaman bank					
29.	Penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak selain bank (simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dll)					
30.	Pembayaran pinjaman bank					
31.	Pembayaran pinjaman kepada pihak lain selain bank					
No.	Prinsip Pengakuan	Frekuensi Pencatatan pada Koperasi				
		STD	TD	KD	D	SD
32.	Aset diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.					
33.	Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.					
34.	Penghasilan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.					
35.	Beban diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.					
No.	Prinsip Pengukuran	Frekuensi Pencatatan pada Koperasi				
		STD	TD	KD	D	SD
36.	Transaksi-transaksi diukur berdasarkan 'Biaya Historis/Harga Perolehan'.					
37.	Transaksi-transaksi diukur berdasarkan 'Nilai Wajar'.					
No.	Prinsip Pengungkapan	Frekuensi Pencatatan pada Koperasi				
		STD	TD	KD	D	SD
38.	Entitas memberikan informasi mengenai domisili dan bentuk hukum Koperasi serta alamat kantor yang terdaftar.					
39.	Entitas memberikan informasi mengenai penjelasan sifat operasi dan aktivitas utama.					
40.	Entitas memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.					
41.	Entitas memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.					
No.	Prinsip Penyajian	Frekuensi Pencatatan pada Koperasi				
		STD	TD	KD	D	SD
42.	Entitas menyajikan Laporan Perubahan Posisi Keuangan (Neraca).					
43.	Entitas menyajikan Laporan Laba Rugi (Laporan Sisa Hasil Usaha)					
44.	Entitas menyajikan Laporan Perubahan Modal					
45.	Entitas menyajikan Laporan Arus Kas					
46.	Entitas menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan					
47.	Entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca.					
48.	Entitas menyajikan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan secara konsistens antar periode.					
49.	Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimal satu tahun sekali.					
50.	Entitas menyajikan informasi komparatif (perbandingan) periode pelaporan sebelumnya.					